

BAB II

IDENTITAS POSKOLONIAL MALAYSIA

Memahami sebuah sikap atau pandangan rezim politik sebuah negara tidaklah cukup dengan menganalisa kepentingan dan praktek rezim tersebut dalam mengambil keputusan. Selalu ada faktor ide yang menjadi kesepakatan bersama baik secara sadar maupun tidak sadar yang berpengaruh penting dalam membentuk kepentingan dan mempengaruhi tindakan yang diambil tersebut. Identitas yang terwujud secara historis, sosial, politis, maupun diskursif, menjadi alat petunjuk penting untuk melacak ide tersebut. Pengalaman sejarah penjajahan yang dialami Malaysia mewariskan identitas poskolonial yang terbentuk dan melembaga paska kemerdekaan negara tersebut. Politik fragmentasi etnis pemerintah kolonial berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan Malaysia tahun 1957 yang kemudian melembaga dalam wujud sistem pemerintahan dan politik Malaysia. Bab ini akan membahas proses dari sejarah kolonialisme dan imperialisme Inggris hingga terbentuknya identitas poskolonial di Malaysia.

A. Imperialisme Inggris dan Penjajahan Malaysia

Imperialisme dan kolonialisme mendominasi rekam sejarah sebagian besar negara di dunia. Praktek yang merujuk pada penguasaan suatu negeri lain (baca: tanah jajahan) ini, bahkan menjadi salah satu faktor penggolongan tipologi kelompok negara yang saat ini dikenal sebagai negara dunia ketiga. Selain itu, kedua praktek tersebut juga

pembangunan yang menyebabkan negara tersebut tenggelam dalam aras kemiskinan dan ketertinggalan.

Istilah imperialisme dan kolonialisme sendiri, meskipun sering bertumpang tindih, sesungguhnya memiliki arti yang berbeda. Jika kolonialisme diartikan sebagai penaklukan tanah penduduk asli oleh penduduk pendatang, maka imperialisme memiliki makna yang lebih luas. Menurut Dr. J. Bartstra, imperialisme adalah usaha untuk mempererat kembali perhubungan antara daerah-daerah jajahan dengan negeri induk, baik dengan hubungan kultural, persatuan bea, maupun dengan mengadakan perjanjian-perjanjian militer.²⁹ Sedangkan J. Schumpeter berpendapat, imperialisme adalah suatu kecenderungan daripada suatu negara untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas dengan melakukan kekerasan.³⁰ Dari kedua pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa imperialisme merupakan sebuah praktek politik yang berusaha menguasai keseluruhan aspek dari negeri jajahan, tidak hanya penguasaan wilayah. Penguasaan total inilah yang selama berabad-abad berlangsung dalam sejarah manusia dari era sebelum masehi, abad pertengahan, bahkan hingga sekarang.

Kolonialisme dan imperialisme muncul kembali pada akhir abad 15 ketika paham ekonomi merkantilis yang dianut negara-negara Eropa saat itu mengharuskan tiap negara melakukan akumulasi kapital sebanyak-banyaknya termasuk dengan mencari komoditas dagang ke sumbernya

langsung. Kemajuan teknologi navigasi pelayaran serta momentum keberhasilan pelaut Portugis Vasco da Gama meretas jalan ke timur pada tahun 1498 untuk mencari sumber rempah-rempah yang merupakan komoditas sangat berharga saat itu, menjadi faktor pendorong gelombang ekspedisi ke negeri timur. Ketika jalan ke timur telah ditemukan dan ia berhasil sampai di India, perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Dimulai oleh Portugis dan Spanyol, Inggris dan Belanda kemudian mengikuti jejak kedua negara tersebut untuk mencari daerah sumber penghasil komoditas dagang. Faktor ekonomi sebagai pendorong berangsur beringsut menjadi faktor politik dengan menguasai daerah tujuan untuk memonopoli perdagangan.

Penguasaan tanah jajahan menjadi diskursus politik utama Eropa pada abad 15 dan kurang lebih selama empat abad ke depan. Menurut Winks, sebagaimana dikutip Arief Budiman, paling tidak ada tiga penjelasan sejarah utama yang menjelaskan dorongan dan alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi keluar dan menguasai wilayah tujuan. Paradigma tersebut antara lain yang menekankan pada idealisme manusia (menyebarkan ajaran tuhan), yang menekankan pada kehausan manusia terhadap kekuasaan, dan yang menekankan pada keserakahan manusia mencari kekayaan.³¹ Penjelasannya sebagai berikut:

a. *God theory*

Teori ini menjelaskan bahwa motivasi teologis (penyebaran agama) menjadi alasan utama orang-orang Eropa mengarungi samudra ke wilayah-wilayah baru. Mereka ingin membaptis orang-orang barbar yang belum mengenal tuhan. Hal ini seperti ucapan Paus Urbanus II tahun 1099 yang dikutip Morgenthau:

For this land which you inhabit, shut in on all sides by the seas and surrounded by the mountain peaks, is too narrow for your large population; nor does it abound in wealth; and it furnishes scarcely food enough for its cultivators. Hence it is that you murder and devour one another, that you wage war, and that very many among you perish in civil strife.³²

b. *Glory theory* (teori atavisme)

Alih-alih menyebarkan agama, teori ini menjelaskan bahwa alasan utama kolonialisme Eropa adalah kehausan akan kebesaran dan kekuasaan. Salah satu pencetusnya adalah Joseph A. Schumpeter, yang dalam bukunya *Imperialism and the Social changes* ia membuktikan bahwa banyak negara-negara Eropa mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangan menjadi imperialis dan kolonialis.

c. *Gold theory*

Menurut Thomas A. Hobson, imperialisme dan kolonialisme merupakan implikasi kemajuan kapitalisme yang mendorong negara-negara Eropa dorong oleh keinginan mencari pasar, sumber komoditas, dan lahan investasi yang lebih

menguntungkan. Dari paham marxis, bahkan Lenin mengidentifikasi imperialisme sebagai perkembangan tertinggi dari kapitalisme.

Selain ketiga penjelasan diatas, faktor ide tentang timur atau orientalisme menjadi salah satu paham yang bertanggung jawab dalam etnosentrisme dan pelanggaran penguasaan Eropa terhadap negeri-negeri lain (timur). Edward Said dalam *Orientalisme* menjelaskan faktor ide tersebut berupa representasi timur oleh barat.

Menurut Said, tidak hanya kolonialisme dan imperialisme (kekuasaan politik) yang menjadi perwujudan penguasaan barat terhadap timur. Ada bentuk penguasaan lain yaitu: kekuasaan intelektual (mendidik Timur melalui sains, linguistik, dan pengetahuan lain), kekuasaan kultural (kanonisasi selera, teks, dan nilai-nilai), dan kekuasaan moral (apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan oleh timur). Melalui keempat relasi dan praktek penguasaan tersebut, supremasi Barat berlangsung dan berhasil menempatkan Timur dalam posisi subordinat.

1. Sejarah Imperium dan Kolonialisme Inggris

Sejarah mencatat Inggris merupakan negara dengan wilayah jajahan terluas di dunia, yang pada tahun 1900 mencakup dua puluh persen wilayah daratan dunia dan hampir empat ratus juta penduduk. Hingga kini sejumlah 53 negara bekas jajahan Inggris masih menjalin

negara tersebut masih mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara seperti Australia. Sementara beberapa negara yang lain tidak mengakuinya meskipun masih menganggapnya sebagai kepala persemaikmuran seperti India dan Pakistan.

Proses penguasaan hingga kesuksesan Inggris semasa era kolonial ini dimulai jauh sebelumnya, ketika Raja Inggris saat itu Henry VII (1485–1509) memberikan hak penguasaan kepada John Cabots (Giovanni Caboto) tahun 1498 untuk wilayah yang ditemukannya.³³ John Cabots, seorang kelahiran Italia yang kemudian pindah ke Bristol, Inggris, dengan dukungan penuh kerajaan Inggris menjelajahi dunia untuk menemukan jalan ke Asia melalui jalur Barat. Ia berhasil meyakinkan Raja Henry VII untuk mensponsori perjalanannya setelah berita keberhasilan Colombus menemukan dunia baru meluas ke seluruh Eropa. Ia beralasan Asia lebih dekat dilayari melalui jalur yang lebih utara dari pada yang dilalui oleh Colombus. Pada tahun 1497 ia berhasil mencapai wilayah New Foundland di Amerika Utara. Sekembalinya dari penjelajahan yang ia katakan telah sampai ke Jepang, Kerajaan Inggris memberinya hak penguasaan tersebut.³⁴

Namun kurang lebih selama satu abad sejak era itu, tidak ada lagi usaha berarti dalam penguasaan wilayah temuan tersebut secara efektif. Dibandingkan dengan Spanyol maupun Portugis, Inggris

³³ Egerton, Hugh Edward, *A Short History of British Colonial Policy*, London: Methuen & Co, 1897, hal: 13

³⁴ Cabot (diakses tanggal 6 Juni 2012); diunduh dari http://library.thinkquest.org/J002678F/john_cabot.htm

termasuk terlambat dalam mengeksplorasi wilayah baru. Ada beberapa alasan antara lain kurangnya budaya dan pengetahuan navigasi serta penjelajahan Inggris, lemahnya angkatan laut Inggris, posisi John Cabots sebagai bukan orang asli Inggris, serta posisi Vatikan yang lebih memilih dukungan terhadap Spanyol dan Portugal. Khusus untuk legitimasi dari Vatikan saat itu, hal ini tidak lepas dari kedekatan Raja Spanyol terhadap Paus sehingga Inggris hanya diberikan konsesi eksplorasi di atas garis lintang 44° . Faktor retaknya hubungan Inggris dengan Vatikan inilah yang dikemudian hari, pada era Raja Henry VIII (1509-1547), terjadi revolusi Kristen Anglikan di Inggris dimana Raja mengeluarkan hukum supremasi yang melegitimasi sebagai kepala gereja tertinggi.

Selama 38 tahun kekuasaan Henry VIII inilah selain terjadi restrukturisasi perpolitikan Inggris dengan melepaskan diri sepenuhnya dari Vatikan dan membangun kekuatan angkatan lautnya. Baru pada era penerusnya, Ratu Elizabeth I (1558-1603) yang secara total merubah orientasi politik yang lebih berorientasi keluar dan berani agresif menghadapi Spanyol dan Portugis, Inggris secara drastis meningkatkan sponsor eksplorasi lautan. Pada 1580, Sir Francis Drake menjadi orang Inggris pertama yang menjelajahi dunia. Luasnya wilayah jelajah serta besarnya harta yang dibawanya pulang dalam eksplorasi tersebut menginspirasi kerajaan Inggris untuk

Sebagaimana kekuatan kolonial yang lain, Inggris pertama kali hadir di Semenanjung Malaya bukan bertujuan untuk menguasai wilayah melainkan untuk berdagang. Namun setelah berhasil menancapkan kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat di India, Inggris kemudian berminat untuk memperlebar pengaruhnya di Semenanjung Malaya. Hal ini didorong oleh kekayaan sumber daya alam, ketidakstabilan entitas politik lokal, dan konstelasi perpolitikan Eropa yang memungkinkan Inggris menguasai secara politik di negeri tersebut.³⁵

Inggris mendirikan koloni di Semenanjung Malaya pada tahun 1789 dengan merampas dan menyewakan pulau Penang kepada Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) dari kesultanan Kedah dan diikuti dengan pendudukan Singapura pada tahun 1819.³⁶ Pada 1824, Inggris menguasai Malaka setelah ditandatanganinya Traktat London dengan Belanda yang membagi kepemilikan wilayah jajahan dengan pembagian Singapura ke atas untuk Inggris dan Singapura ke bawah untuk Belanda. Perjanjian ini menandai pertukaran wilayah antara Malaka yang sebelumnya dikuasai Belanda dengan Bengkulu yang sebelumnya dikuasai Inggris. Selain itu kerajaan Johor Lama yang meliputi wilayah Riau dan Lingga menjadi wilayah penguasaan Inggris. Penang, Malaka, dan Singapura kemudian disatukan pada tahun 1826 di bawah pemerintahan Negeri-Negeri Selat (*Strait Settlements*).

³⁵ Hooker, Virginia Matheson, *A Short History of Malaysia*, NSW: Allen & Unwin, 2003, hal: 7

Inggris terus berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Kepentingan perluasan wilayah ini dipermudah saat negeri-negeri Melayu lain berusaha mendapatkan bantuan Inggris baik dalam perlindungan pakta pertahanan maupun penyelesaian konflik internal. Kepentingan pertambangan timah di negeri-negeri Melayu bagi para saudagar di Negeri-Negeri Selat membuat pemerintah Inggris melakukan campur tangan di dalam negeri-negeri penghasil timah di Semenanjung Malaya.

Inggris berhasil meluaskan pengaruh ke Kesultanan Nanning melalui Perang Nanning tahun 1831-1832. Pulau Pinang dikuasai sebagai hadiah setelah ada perjanjian keamanan dengan Sultan Abdullah di Kedah menghadapi ancaman Bugis dan Siam. Pengiriman Kapal Meriam Britania yang dipimpin oleh Andrew Clarke dilakukan guna meredam ancaman bajak laut Cina dan Melayu. Kapal ini pulalah yang digunakan sebagai diplomasi meriam dalam Perjanjian Pangkor tahun 1874 yang menandai perluasan pengaruh dan kekuasaan Inggris di Tanah Melayu secara tidak langsung (*indirect rule*) dengan pelantikan Residen sebagai penguasa tunggal.³⁷

Pada awal abad ke-20, negeri Pahang, Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan atau yang dikenal dengan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (*Federated Malay State*) berada di bawah kendali Residen Jenderal Inggris Frank Swettenham. Perjanjian Bangkok tahun 1909 yang dibuat oleh

³⁷ *Ibid* hal: 37

Kerajaan Inggris dan Perancis membuat wilayah kekuasaan Inggris meluas dengan dikuasainya Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu. Empat kesultanan ini ditambah Johor yang dikenal sebagai Negeri-Negeri Melayu tak Bersekutu (*Unfederated Malay State*), tidak diperintah langsung dari London namun menerima para penasihat residen. Johor menjadi satu-satunya negeri yang merdeka hingga abad ke-19 karena kedekatan Sultan Abu Bakar dari Johor dan Ratu Victoria. Namun pada tahun 1914 Sultan Ibrahim sebagai pengganti Sultan Abu Bakar akhirnya mau menerima seorang penasihat Britania. Inggris juga meluaskan kekuasaannya di Kalimantan Utara. Sabah diperintah sebagai koloni mahkota Borneo Utara. Sedangkan Sarawak dibeli dari Brunei sebagai kerajaan pribadi keluarga Brooke.

Pembukaan perkebunan dan pertambangan di Malaysia pada pertengahan abad 19 baik yang dilakukan oleh pemerintah Inggris maupun swasta membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, yang tidak bisa dicukupi oleh tenaga kerja lokal. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan masuknya pekerja asing baik yang sengaja didatangkan oleh pemerintah maupun keinginan pribadi untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di Malaysia. Pekerja-pekerja ini umumnya datang dari Indonesia (Jawa dan Sumatra), India, dan China. Pekerja dari Indonesia umumnya bisa berbaur dengan masyarakat lokal karena adanya kemiripan budaya dan agama. Mereka juga bisa berakulturasi dan melebur

China relatif kesulitan dalam berbaur dengan masyarakat lokal yang kemudian menciptakan adanya segregasi dan fragmentasi sosial dalam kehidupan sosial Malaysia.

Hingga kedatangan Jepang ke Semenanjung Malaka dan Kalimantan utara, Kolonial Inggris berhasil menguasai Malaysia baik secara politik administratif maupun secara kultural. Perlawanan dengan kekerasan yang muncul bisa diredam dengan mudah, bahkan kemerdekaan Malaysia pun bisa dicapai melalui proses yang damai dan konstitusional, tanpa bersusah payah dengan perlawanan frontal.

B. Pemposisian Negara Terjajah (*colonized state*) sebagai Subjek Kolonial

Penguasaan terhadap suatu entitas wilayah tertentu, tentu saja berimplikasi baik secara politik, ekonomi, budaya, maupun epistemik terhadap wilayah yang dikuasai tersebut. Tatanan sistem-sistem tersebut wilayah jajahan yang sudah ada, dirombak dengan kehadiran kolonialisme untuk kepentingan negara kolonial. Bahkan oleh Frantz Fanon, kolonialisme diartikan sebagai penonmanusiawian (*dehumanization*) rakyat di daerah koloni. Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Hal ini oleh Edward Said disebut sebagai orientalisme klasik dimana para pemegang kekuasaan

tidak mau mengakui bahwa mereka telah dengan mudah mengkonsensi dan

menyajikan timur dengan sekali pandang, dengan mengabaikan detail aktualitas Timur yang sebenarnya.

Pembendaan inilah yang salah satunya dilakukan oleh pemerintah Inggris dalam memformulasikan tatanan masyarakat Malaysia dengan menghadirkan pekerja China dan India. Namun kehadiran mereka tidak diimbangi kebijakan kolonial yang justru bersifat dikotomis dan tidak mewadahi mereka untuk berakulturasi dengan masyarakat lokal. Dalam skema kolonialisme yang diterapkan, tatanan sosial tradisional masyarakat lokal yang ada cenderung dipertahankan. Hal ini menurut William Roff bertujuan untuk menjaga kestabilan yang ditambah dengan tatanan birokrasi barat sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi dan kelancaran eksploitasi sumber daya alam. Dalam pandangan Inggris:

*Malays were lazy, unwilling to work for wages and therefore could not be considered a potential pool of labour in the colonial economy.*³⁸

Pandangan inilah yang menjadikan pertambangan Timah dan Perkebunan Karet yang mengalami peningkatan pesat pada saat itu diserahkan kepada pekerja dari China dan India. Sementara untuk masyarakat Melayu dibiarkan untuk mengelola sektor agraris dengan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya krisis beras antara tahun 1918 dan 1921 sehingga pemerintah kolonial melarang petani Melayu menanam tanaman selain padi. Dalam Melayu tradisional sebelum kedatangan Inggris, sebenarnya terdapat stratifikasi sosial-politik yang kemudian membentuk stratifikasi

³⁸ Andaya, *A History of Malaysia*, hal 176, dalam Soh, Byungkuk, *Ideology and Shaping of*

kultur dalam masyarakat. *Sultan* merupakan tingkatan sosial tertinggi yang memiliki *daulat* kekuasaan. Di bawah sultan ada *bendahara* kelas aristokrat dan bangsawan yang menjadi perwakilan sultan sebagai kepala wilayah. Keberadaan stratifikasi ini mengakibatkan budaya primordialisme dan patronase yang kuat, yang berimplikasi pada relatif stabilnya perpolitikan dan sosial Malaysia.

Dari tahun 1827 hingga 1931, populasi etnis China di Malaka tumbuh signifikan dari 4.000 menjadi 85.342, atau mencapai 40% dari total populasi (Hayes-Hoyt, 1993: 25). Meskipun etnis China yang lahir di Malaysia cukup kaya, dengan cepat etnis China pendatang menyusul mereka yang kemudian menjadikan etnis China menjadi kelas sosial tersendiri. Etnis China pendatang umumnya tidak berhasil terasimilasi dengan baik dengan penduduk lokal, memisahkan diri dengan lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu serta mengorganisasikan diri dibawah *kongsi* yang merupakan asosiasi menurut dialek, asosiasi klan, dan asosiasi rahasia yang memperjuangkan kepentingan etnis China.³⁹

Kedatangan etnis India juga berbarengan dengan etnis China. Kebutuhan tenaga perkebunan yang cukup besar menjadikan Inggris mendatangkan etnis India terutama yang berasal dari kasta rendah atau orang Tamil yang berkulit gelap, miskin, dan tidak berpendidikan.

³⁹ Daniels, P. Timothy, *Building Cultural Nationalism in Malaysia: Identity, Representation, Citizenship*, 2005, New York: Routledge, hal: 22

Sementara untuk supervisor perkebunan dipekerjakan orang India yang beretnis Himalaya dan Ceylon. Orang India lain yang ada di Malaysia adalah pedagang muslim dari Gujarat dan India Selatan.

Pemerintah Kolonial Inggris mengklasifikasi dan mengidentifikasi kelompok sosial ini dengan pertimbangan warna kulit (*sense of whiteness*) untuk menyederhanakan penyebutan kelompok etnis yang ada. Derajat keputihan ini juga digunakan untuk menilai prestis dan keberadaban masyarakat. Etnis India menempati posisi sebagai pekerja perkebunan dan pertambangan, etnis Melayu sebagai produsen kebutuhan pangan, sementara etnis China menempati posisi sebagai kelas menengah, sebagai pedagang dan penarik pajak.

However, later in the nineteenth century, with the beginning of decennial census taking in 1871 and economic and political legal codes based upon these census reports, British conceptions of local peoples became more fixed and increasingly more biological (Shamsul A.B. 1998, Milner 1998, and Reid 2001)⁴⁰

Pengidentifikasian secara general ini juga dilakukan terhadap kelompok hibrida atau kelompok masyarakat hasil dari kawin campur antar etnis yang terdiri dari kelompok *jawi peranakan*, India-melayu, Arab-Melayu, dan Eropa-Melayu (*Eurasian*). Kelompok hibrida ini, sebagaimana dikatakan oleh Andaya (1980), kurang dihormati dan cenderung dicurigai oleh pemerintah Inggris. Wacana kecurigaan ini tak

hanya terjadi di level elit. Dalam masyarakat, kelompok India yang

berpindah agama menjadi Muslim menjadi kelompok yang dicurigai baik oleh etnis Melayu maupun India asli.

Hal ini menunjukkan standar peradaban Barat (baca: Inggris) benar-benar menjadi standar utama dalam penilaian terhadap komunitas masyarakat lain. Politik etis dalam hal pendidikan menjadi salah satu prasarana utama pelembagaan sistem orientalisme dan politik perbedaan ini. Pada tahun 1921, George Maxwell Sekretaris Utama dari FMS (*Federated Malay States*) mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya pendidikan pada dasarnya bukanlah untuk meningkatkan kualitas generasi muda Malaysia, melainkan agar terjadi peningkatan produksi masyarakat pedesaan.

The aim of the Government is not to turn out a few well-educated youths, nor yet numbers of less well educated boys; rather it is to improve the bulk of the people and to make the son of fisherman or peasant a more intelligent fisherman or peasant than his father had been, and a man whose education will enable him to understand how his own lot in life fits in with the scheme of life around him.⁴¹

Pendidikan, termasuk didalamnya pengajaran bahasa Inggris, menurut Gayatri Spivak merupakan bentuk kekerasan epistemis negara penjajah terhadap tanah jajahan atau dikenal sebagai *the burden of English*. Bahasa merupakan alat dominasi paling halus dan bekerja secara kasat mata dalam mengkonstruksi representasi objek tertentu oleh pihak tertentu. Menggunakan istilah Derida, masyarakat Malaysia era penjajahan

salah. Kesalahan pelabelan ini terjadi karena keberadaan ide-ide berbasis etnis tentang yang lain (*the others*). Stratifikasi kelompok sosial etnis yang signifikan inilah yang dikemudian hari berpengaruh besar dalam pembentukan kebangsaan Malaysia

C. Kemerdekaan dan Pembentukan Kebangsaan (*nation building*) Malaysia

Konsepsi negara-bangsa yang telah melekat dan menjadi entitas baku hubungan internasional, kadang disertai dengan tumpang tindih sehingga patut dipertanyakan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ranah antara kedua konsepsi tersebut. Negara merupakan konsep politik-hukum, sementara bangsa adalah konsep psikologis. Implikasi dari penggabungan tersebut adalah adanya keharusan kesamaan psikologis yang disertai dengan keterikatan identitas yang sama dalam populasi suatu negara. Hal ini berarti, keterikatan elemen identitas yang lain harus dilepaskan dan berasimilasi dengan elemen identitas nasional. Namun ini menjadi permasalahan ketika negara sebagai entitas politik-hukum yang ada gagal dalam berasimilasi dengan elemen identitas kultural-historis (baca: kebangsaan) yang ada.

Persoalan bangsa dan kebangsaan merupakan persoalan yang selalu melekat di kelompok negara dunia ketiga. Sebagai negara baru yang terbentuk melalui revolusi kolonial, pembentukan tatanan identitas baru merupakan tantangan tersendiri karena harus merelakan dan mengabaikan

identitas lama. Dengan Barat pendatang, menjadi salah satu aktor utama

pembentukan negara baru ini. Warisannya berupa formasi politik, ekonomi, budaya, maupun sosial mempunyai peranan penting dalam membentuk identitas bangsa yang lahir tersebut. Pun dengan pembentukan kebangsaan Malaysia.

Awal abad 20 menandai bangkitnya kesadaran nasional di Malaysia yang dipelopori oleh kebangkitan kaum intelektual Malaysia, terutama etnis Melayu. Melalui perjalanan haji, mereka dikenalkan dengan pemikiran pembaruan Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Sepulangnya dari ibadah haji, pemikiran mereka dituangkan dalam jurnal-jurnal seperti *Al Imam*, *Neraca*, *Al Ikhwan*, *Tunas Melayu*, *Pengasuh*, dan *Saudara*. Meskipun pada awalnya isi dari jurnal-jurnal tersebut berusaha mereformasi pemahaman Islam tradisional di Malaysia, namun lambat laun memuat tentang perlawanan politik dan kesadaran nasional.

Kebangkitan kaum intelektual melayu mendorong munculnya *Semangat Kemelayuan* untuk menghadapi tantangan kaum pendatang (baca: China dan India) yang pada tahun 1920an mulai menjadi kelas dominan dalam hal ekonomi. Menurut Byungkuk Soh (2012), paling tidak ada tiga hal yang kaum intelektual ini lakukan untuk melindungi dan memajukan etnis Melayu. *Pertama*, etnis melayu harus menolak pekerjaan kuli yang digaji rendah dan perdagangan yang timpang dengan etnis lain (China). *Kedua*, kaum intelektual menekankan pada penguatan kerjasama sesama etnis Melayu terutama dalam dunia bisnis dan bekerja sama

dengan *penghulu* dan *ketua kampong* agar masyarakat melayu tidak menjual barang dagangan ke toko-toko milik orang China. *Ketiga*, mendorong untuk melindungi bahasa melayu dengan mendesak tetap menggunakan aksara *jawi* (arab melayu), mendorong pemerintah kolonial untuk menggunakan bahasa melayu dalam tes masuk pegawai negeri sipil, serta mendirikan komite bahasa di setiap wilayah.

Selain dengan melindungi bahasa melayu, strategi lain dalam menguatkan kesadaran nasional adalah dengan jalan organisasi. Hampir sama dengan cara yang pertama, strategi yang kedua inipun terkesan bias etnis. Organisasi yang termasuk awal didirikan di Malaysia adalah *Jamilu-Bari Wal-Bahar* (Angkatan Dilaut dan Didarat) di Trangkeru pada tahun 1910, *Darul-Akhir* di Banda Kapa pada tahun 1915, Kesatuan Guru-Guru Melayu Melaka pada tahun 1923; dan *Dadan Setia* di Tangga batu. Organisasi-organisasi ini lebih menekankan diri dalam bidang sosial dan kesejahteraan. Organisasi dengan orientasi politik pertama kali didirikan tahun 1924 yakni Kesatuan Melayu Singapura (KMS) yang dengan slogan *Bersatu Meninggikan Mutu* berusaha mewadahi kepentingan Melayu terhadap pemerintah dan kelompok etnis lain. Pada tahun 1934 didirikan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) yang merupakan organisasi melayu yang mencakup seluruh semenanjung Malaya.

Perjuangan dan perlindungan bahasa menjadi pokok perhatian dalam misi organisasi ini. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai

- a. mendorong penggunaan bahasa Melayu baik dalam menulis maupun membaca
- b. mempromosikan sejarah, adat istiadat, dan bahasa
- c. mendirikan perpustakaan⁴²

Pada tahun 1938, organisasi ini menerbitkan jurnal bulanan *Pemberita Pejabat Paspam* yang dibaca lebih dari 12.000 anggotanya di seluruh semenanjung Malaya dan Singapura. Menurut Benedict Anderson, bahasa dan penerbitan sendiri merupakan pelopor utama kesadaran nasionalisme sebagai mata rantai pengait esensial (Anderson, 1983). Anderson juga mengatakan bahwa kaitan esensial ini terbentuk paling tidak melalui dua cara. *Yang pertama* adanya kebetulan kalendris dengan penempatan emblem tanggal terbit di tiap jurnal yang diterbitkan. *Yang kedua* terletak pada hubungan timbal balik antara surat kabar, sebagai suatu bentuk buku, dengan pangsa pasarnya.

Berbeda dengan etnis Melayu, pengorganisasian etnis China dan India berkembang melalui model historis yang berbeda. Etnis China yang lebih mapan secara ekonomi, secara kultural telah memiliki ikatan organisatoris melalui ikatan primordian (*kanton*). Terjadinya krisis global pada tahun 1929 sangat mempengaruhi perekonomian etnis China. Harga komoditas tambang dan perkebunan di pasar internasional jatuh. Pada tahun 1930, 10.000 pekerja tambang di Perak yang sebagian besar beretnis China kehilangan pekerjaan. Para pekerja pemerintah juga mengalami

⁴² Firdaus Abdullah, *Radical Malay Politics: Its Origins and Early Development*, 1985, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hal: 156-157

nasib yang sama. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, etnis China mendirikan organisasi *Koumintang* (KMT) yang mengadopsi *Koumintang* China dan bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Salah satu anggotanya adalah Chi Peng yang dikemudian hari menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Melayu (MCP). Pada akhir 1930an, kedua organisasi ini dilarang oleh pemerintah kolonial Inggris. Untuk etnis India, mengingat saat itu jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, kurang terlibat dalam pembentukan kesadaran nasional ini.

Beberapa teori mengatakan bahwa pendudukan Jepang yang cukup singkat antara tahun 1942 hingga 1945 memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan nasionalisme negara-negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia. William H. Elsbree menyimpulkan bahwa periode tersebut menandai bangkitnya pergerakan nasionalisme dimana kebijakan Jepang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.⁴³ Pendudukan Jepang selama 48 bulan memiliki pengaruh penting dalam transformasi politik, sosial, dan psikologis terutama etnis Melayu dalam membentuk kesadaran Nasional Malaysia.

Pada masa pendudukan Jepang, konstelasi politik etnis mengalami perubahan. Berkebalikan dengan Inggris yang lebih mengistimewakan etnis China dan India, kebijakan pemerintah kolonial Jepang lebih mendahulukan etnis Melayu. Dalam MMA (*Malayan Military Administration*), etnis Melayu menduduki posisi spesial. Etnis lain relatif

⁴³ Elsbree, William H. *Japan's Role in South East Asian Nationalist Movements 1940 to 1945*,

tidak diakomodasi kepentingannya. Bahkan dalam operasi *sook ching* di Singapura, Jepang membantai 40.000-70.000 etnis China. Semua organisasi milik etnis China juga dibubarkan, dan sebagai gantinya didirikan *Overseas Chinese Association* yang salah satu tujuannya mengumpulkan dana sukarela dari etnis China untuk MMA. Pensubordinasian ini, selain karena adanya sentimen historis Jepang terhadap China, juga karena kekuatan politik komunis China yang dikhawatirkan mengganggu dominasi fasis Jepang.

Selama pendudukan hingga hengkangnya Jepang, sentimen terutama antara etnis China dan Melayu perlahan tetapi pasti terakumulasi. *Malayan People's Anty Japanese Army* (MPAJA), kelompok bersenjata yang disiapkan kolonial Inggris sebelum kedatangan Jepang yang didominasi etnis China, menyebut etnis Melayu sebagai penghianat dan bahkan menyinggung faktor agama sebagai alasan ketundukan mereka terhadap Jepang. Setelah menyerahnya Jepang 15 Agustus 1945, MPAJA keluar dari hutan dan menduduki kantor-kantor pemerintahan hingga kehadiran Inggris kembali pada 5 September 1945. Kerusuhan massal terjadi akibat banyaknya etnis Melayu dicurigai sebagai informan ataupun *kempeitei* (polisi militer) Jepang. Hal ini juga dipengaruhi fakta bahwa selama pendudukan Jepang, militer Jepang yang kebanyakan diisi oleh

Melayu melakukan tindak diskriminasi dan pembunuhan besar

Kebijakan kolonial baik oleh Inggris maupun Jepang yang bias etnis, membuat masa transisi dan pembentukan pondasi negara Malaysia dari tahun 1946 hingga kemerdekaan tahun 1957 menjadi amat riskan. Kegagalan diskursus kesatuan kelompok sosial etnis menjadi sebuah konsesus menjadi akar masalahnya. Atas dasar itulah keinginan untuk merdeka yang dipengaruhi gelombang kemerdekaan baik di Indonesia maupun Vietnam, dicoba untuk ditanggapi pemerintah Kolonial Inggris dengan membentuk sebuah Uni Malaya.

Uni Malaya merupakan rancangan kerangka negara Malaysia yang disusun oleh Malayan Planning Unit (MPU) yang bekerja sama dengan *War Office and the Colonial Office* di London yang diumumkan pada 22 Januari dan 4 Maret 1946. Dalam kerangka tersebut, Uni Malaya terdiri atas empat negara federal, lima negara bukan federal, serta Penang dan Malaka yang dipimpin gubernur dan dewan eksekutif. Seluruh kesultanan yang ada menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada kerajaan Inggris, dan seluruh penduduk diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi.

Uni Malaya mengalami penolakan terutama dari komunitas Melayu karena menganggapnya sebagai kelanjutan dari kolonialisme semata, menegasi posisi sebagai penduduk asli Malaysia, dan mendelegitimasi posisi ordinar yang telah mereka peroleh selama pendudukan Jepang. Perlawanan ini paling tidak dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama dipimpin oleh Dato Onn bin Jaafar dan UMNO, yang merupakan kelas

aristokrat ternama Malaysia dan bertujuan melindungi kepentingan dan

kekuasaan etnis Melayu. Yang kedua dipimpin oleh *Malaya National Party* (MNP) yang menekankan pada kesatuan seluruh elemen etnis, serta bertujuan melepaskan diri sepenuhnya dari kolonial Inggris dan bergabung dengan Indonesia membentuk negara Indonesia Raya. Kedua kelompok ini pada awalnya memiliki kesepakatan bekerja sama untuk melawan dibentuknya Uni Malaya. Dalam deklarasinya, Dato Onn bahkan menyatakan lebih memilih bergabung dengan Indonesia dari pada berada di bawah kekuasaan Inggris.

Maraknya aksi protes dan penentangan menjadikan pemerintah Inggris mengurungkan niatnya untuk membentuk Uni Malaya dan bernegosiasi dengan pemimpin aristokrat Melayu yang dipimpin Dato Onn. Namun Dato Onn meminta hanya perwakilan dari UMNO yang ikut bernegosiasi yang berakibat kekecewaan pihak MNP. Melunaknya sikap ini tak lepas dari jaminan pemerintah Inggris terhadap kelas aristokrat Melayu dalam hal penyerahan kekuasaan. Perlahan tetapi pasti UMNO berhasil menguatkan posisi kekuasaan politiknya dibandingkan dengan parta-partai lain. Hingga saat inagurasi Federasi Malaya pada 1 Februari 1948, UMNO berhasil menjadi partai politik yang paling berpengaruh di Malaysia. Sementara nama MNP tenggelam terutama setelah adanya pemberontakan komunis pada tahun 1948.

Paska pengesahan Federasi Malaya tahun 1948 hingga deklarasi kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan secara penuh pada tahun 1957

menyebabkan momentum penting peletakan formasi sosio politik Malaysia

Meskipun telah diupayakan asimilasi etnis yang ada, persaingan ideologi terutama antara komunis yang banyak dianut oleh etnis China menjadi permasalahan tersendiri. Namun konstelasi segera berubah pada awal tahun 1950an. Dato Onn keluar dari UMNO dan mendirikan *Independence of Malayan Party* (IMP). *Malayan Chinese Association* (MCA) yang tidak berideologi komunis beraliansi dengan UMNO yang kemudian diikuti dengan *Malayan Indian Congress* (MIC). Aliansi ini memenangi pemilu tahun 1955 dan menguatkan kembali isu kemerdekaan penuh dari kolonial Inggris. Pada pembicaraan persiapan kemerdekaan di London pada awal tahun 1956, ketiga elemen aliansi sepakat untuk mencapai kemerdekaan paling lambat 31 Agustus 1957. Namun permasalahan muncul ketika mulai pembahasan tentang konstitusi. UMNO meminta agar hak spesial bagi etnis Melayu sebagai penduduk asli Melayu. Awalnya pihak MCA dan MIC menolak, namun akhirnya dicapai *win-win solution* dengan diakuinya asas *jus soli*, yang sebagai konsekuensinya etnis China dan India yang ada otomatis diakui sebagai warga negara Malaysia. Keistimewaan dalam konstitusi ini sendiri antara lain tentang dasar negara Islam (pasal 3, 11, dan 12), prinsip kesultanan atau monarki (pasal 32 dan 33), dan hak istimewa (pasal 152) dan hak istimewa terhadap etnis Melayu

D. Identitas Poskolonial Malaysia

Bangsa Malaysia yang dikenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad sebagai identitas nasional yang inklusif, kurang berhasil dalam meredakan sentimen dan fragmentasi etnis yang ada di Malaysia. Meskipun secara politik telah dicapai kesepakatan dalam penyusunan konstitusi dasar Malaysia, namun sentimen tersebut masih tetap berlanjut dan menjelma sebagai realitas sosial yang terus berkelindan dalam perkembangan negara Malaysia. Fakta ini menjadi penanda penting untuk melacak keberadaan identitas poskolonial Malaysia, identitas yang kemudian melembaga dalam sistem negara negara ini.

Dalam penyusunan sebuah sistem negara, Simon Dalby dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan identitas dan perbedaan adalah sesuatu yang fundamental.⁴⁵ Namun kedua hal fundamental ini tidak terwujud dalam konteks Malaysia. Rasa keterikatan sebagai bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang tidak terbentuk. Bayangan mengenai bangsa, tidak cukup kuat menggantikan keterikatan imajiner kelompok identitas etnis. Etnis Melayu yang menganggap haknya sebagai penduduk asli harus dispesialkan. Sementara disisi lain, ikatan primordial dan keterikatan dengan tanah leluhur yang masih begitu melekat dalam identitas etnis China dan India menjadikan asimilasi sulit terjadi.

Padahal asimilasi dan pengikatan diri pada bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang adalah hal yang sangat penting dan fundamental

⁴⁵ D. A. Dalby, *China's Foreign Relations: A Study in International Law*, New York: ST

dalam menjadikan konsepsi bangsa stabil. Seperti menurut Ernest Renan (1882), kehendak untuk hidup bersama (*le desir d'être ensemble*) yang timbul dari nasib sejarah yang sama menjadi syarat sesungguhnya suatu bangsa. Perbedaan kultur antara entitas kelompok sosial yang ada di Malaysia, menjadikan kohesi sangat sulit terjadi. Terlebih ketika konstelasi partai dalam sistem politik sebagai sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara juga terfragmentasi sesuai etnis yang berpondasikan formasi sosial yang ada. Fragmentasi inilah yang tersusun dan berkelindan dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dari paska kemerdekaan hingga sekarang.

Paska kemerdekaan tahun 1957, sebagaimana negara-negara paska kolonial yang lain, Malaysia mulai menata diri dan melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan. Masa-masa awal paska deklarasi kemerdekaan Malaysia diwarnai dengan turbulensi politik yang cukup hebat yang diwarnai antara lain dengan penggabungan Singapura tahun 1961 yang kemudian lepas tahun 1965, masuknya Sabah dan Sarawak pada tahun 1963, serta konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Tidak lama kemudian pada tahun 1969 terjadi kerusuhan rasial akibat adanya jurang ketimpangan yang cukup lebar antara etnis Melayu dan China. Konflik ini sendiri merupakan salah satu bentuk nyata implikasi dari segregasi etnis antara kekuatan ekonomi etnis China dan kekuasaan politik Melayu, sebagai wujud ketidakstabilan

formasi sosial politik yang merupakan warisan kolonial Inggris

A consistent challenge for all Malaysian political parties, a challenge which the British had failed to solve before their colonial administration ended, was how to persuade Malays that sharing political power with non-Malays would not threaten their interests.⁴⁶

Kerusuhan tersebut benar-benar menghentak kesadaran pemimpin Malaysia saat itu mengenai rentan dan rapuhnya relasi antar identitas yang ada. Fragmentasi sosial, budaya, politik, yang ditambah kondisi ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu kerusuhan tersebut membuat pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan *new economic policy* (NEP) pada era pemerintahan perdana menteri Tun Razak. NEP sendiri pada dasarnya merupakan kebijakan ekonomi baru yang dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pendapatan dalam masyarakat Malaysia. Namun persepsi yang dibangun dalam pemerintah saat itu, kebijakan yang ada harus berpihak pada etnis Melayu karena berbagai bidang perekonomian dikuasai oleh etnis China. Padahal dalam realitas di lapangan etnis India juga menghadapi persoalan perekonomian yang sama.

Tujuan jangka panjang dari kebijakan ini adalah penguasaan 30 persen dari perekonomian dimiliki oleh etnis melayu (*bumiputera*) pada tahun 1990. Beberapa poin lain dari kebijakan ini antara lain kuota khusus bagi etnis Melayu dalam ranah publik seperti penerimaan pegawai negeri sipil dan penerimaan masuk perguruan tinggi. Saham di beberapa perusahaan juga diberikan kepada etnis Melayu yang memiliki prestasi. Namun dalam implementasinya kebijakan ini tidak juga sepenuhnya

berpihak pada etnis Melayu secara keseluruhan, melainkan pada mereka yang dekat dengan partai UMNO yang berkuasa.

Thus the NEP 30's per cent Malay wealth ownership target (often invoked as an ethnic chudgel to advance particular Malay business interests), has enabled influential Malay politicians and businessmen with close links to UMNO leaders to amass wealth for themselves. NEP privileges- claimed in the name of the name of the mass of ordinary Bumiputeras- have mainly been appropriated by the better connected in the Bumiputera community. (Gomez and Jomo 1997: 53)⁴⁷

Kebijakan ini juga memelopori kebijakan-kebijakan lain yang berorientasi Melayu dalam bidang bahasa, kebudayaan, dan hukum. Bahasa Melayu menjadi bahasa wajib di berbagai instansi sementara Islam menjadi agama negara dan hukum syariah diterapkan. Pemaksaan penggunaan bahasa sebagaimana diungkapkan oleh Spivak, merupakan wujud kekerasan epistemis terhadap kelompok etnis lain.

The DBP Act was amended in 1978 and expanded in 1995 to include:
(1) implementing the national language in all fields including science and technology;
(2) expanding Bahasa Malaysia's special and official place as the national language with respect to its literary basis and content;
(3) to encourage the correct use of the national language; and technical development of the language in terms of istilah (grammar) and other areas that require specialist attention. The DBP is therefore empowered by the state to use state money to prevent the linguistic displacement of the Malay language to avoid language stasis, and language death as seen in the case of Latin.⁴⁸

Penerapan NEP yang diikuti dengan kebijakan pro Melayu lain tentunya menuai tanggapan dan reaksi dari kelompok etnis yang lain.

⁴⁷ Willford, Andrew C., *Tamil Identity and the Ethnic Fetish in Malaysia*, Michigan: University of Michigan press, 2006, hal: 32

⁴⁸ Lappa, Anthony L. dan Lionel Wee, *Language Policy and Modernity in South East Asia:*

Malaysia, Singapore, Thailand, Singapore: Springer, hal: 42

*People agree that the worst episode for interethnic relations the May 13, 1969 tragedy, but many also view the 1980s as a bad period for ethnic relations, inflamed by certain politicians and over-zealous chauvinists.*⁴⁹

Contoh kasus diatas merupakan bentuk dari nasionalisme etnis, yang dibedakan dari nasionalisme sipil. Menurut Liah Greenfeld nasionalisme etnis cenderung agresif, melakukan kekerasan untuk mendahulukan bangsa dari individu serta mengeluarkan para anggota yang tidak memiliki ciri etnis yang sama.⁵⁰ Hal ini sekaligus menjadi antitesis Anderson yang menolak untuk menyadari kemungkinan adanya alternative, varian, dan nasionalisme yang berbeda-beda.⁵¹ Nasionalisme Malaysia jelas berbeda dengan nasionalisme yang terbentuk di negara paska kolonial lain. Nasionalisme Malaysia adalah nasionalisasi dalam kerangka kebangsaan yang terpolar. Identitas poskolonial bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Hubungan antara identitas poskolonial yang berbentuk kekuasaan terpolar dan subordinasi etnis menjadikan konsepsi identitas kelompok menjadi sesuatu yang riskan, rapuh, dan mengambang di Malaysia. Kehadiran pekerja migran mulai tahun 1980an menjadikan kontestasi antar identitas semakin rumit. Struktur identitas Malaysia, dengan etnis melayu aristokrat (baca: UMNO) sebagai kelas tertinggi, menjadikan kehadiran pekerja migran ini sebagai sebuah dilema antara kebutuhan dan ancaman

⁴⁹ Abdul Rahman Embong, *The Culture and Practice of Pluralism in Postcolonial Malaysia*, dalam Hefner, Robert W. (eds), *The Politics of Multiculturalism; Pluralism, Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Hawaii: University of Hawaii Press, 2001, hal: 75

⁵⁰ R. ... dan ... Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia, Yogyakarta: Ombak, 2012, hal: ...